

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH (BOS) SMA MUHAMMADIYAH DI  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**SKRIPSI**

Oleh  
**JUMIANTI**  
NIM 105730479914



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**TRANSPARANI DAN AKUNTABILITAS DALAM  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH (BOS) SMA MUHAMMADIYAH DI  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**J U M I A N T I  
105730479914**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## **MOTTO**

“Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar,  
kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.”  
(Imam Syafi'i)

“Saat kamu merasa ingin berhenti berjuang, ingatlah  
bagaimana perjuangan orangtuamu untuk membesarkanmu..”

“Mereka yang berhenti belajar, akan menjadi pemilik Masa Lalu.  
Dan mereka yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik Masa  
Depan.”

“Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan  
telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras,  
keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan.” (Chairul Tanjung)

...Man Jadda Wa Jada...

## **PERSEMBAHAN**

Karya kecil ini dengan tulus kupersembahkan untuk Mama  
dan Ayahku tercinta, yang telah mengurai cinta kasih  
yang tak bertepi melalui lantunan do'a untuk keselamatan,  
yang mencintai dan menyayangiku sepenuh hati,  
yang dengannya kebahagiaanku takkan pernah pudar,  
yang dengan keringat letihnya membesarkanku tanpa keluhan,  
sehingga menjadi motivasi bagiku untuk meraih kesuksesan,  
serta sebagai tanda hormat dan baktiku atas segala pengorbanan  
yang telah diberikan utukku selama ini.

Uhibbukunna fillah, Mama, Ayah.....

Dan juga sebagai wujud terima kasihku kepada  
seluruh Keluargaku, Sahabat-sahabatku,serta Almamaterku



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang"

Nama Mahasiswa : JUMIANTI

No. Stambuk/ NIM : 10573 04799 14

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. H. Sanusi A.M., SE., M.Si  
NIDN : 0027035501

Pembimbing II

Abd. Salam HB., SE., M.Si.Ak.CA  
NIDN : 0931126607

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
Ismail Rasulong, SE, MM  
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Ismail Badollahi, SE.M.Si.AK.CA.CSP  
NBM : 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

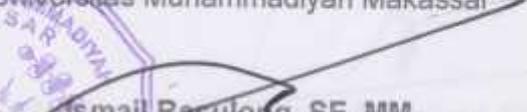
Skripsi atas Nama JUMIANTI, NIM 105730479914, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H  
31 Agustus 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM  
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM  
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE., MM.AK.CA.CPA  
2. Faidul Adzim, SE., M.Si  
3. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC  
4. Drs. H. Hamzah Limpo, M.Si 

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Ismail Rasulong, SE, MM  
NBM : 903078





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumianti

Stambuk : 105730479914

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah Pangsidi di Kabupaten Sidenreng Rappang"

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 01 September 2018  
Yang Membuat Pernyataan.

**Jumianti**

Diketahui Oleh:

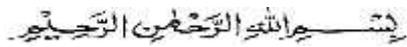
Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

**Ismail Rasulong, SE. MM**  
**NBM : 903078**

**Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA. CSP**  
**NBM: 1073428**

## KATA PENGANTAR



Dengan segala ketulusan dan kelembutan hati, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala* atas berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula penulis haturkan salam dan shalawat bagi Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* beserta para keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah setelah penulis melewati masa-masa pembelajaran di prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar ini, akhirnya penulis telah menyelesaikan tugas akhir di kampus ini guna untuk meraih gelar SE (Sarjana Ekonomi). Dalam proses penyelesaian studi di kampus biru ini, penulis banyak mendapat bantuan dan manfaat dari banyak pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terima.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr.H Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE,M.Si.Ak.CA.CSP selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Muchriana Muchran, SE, M.Si,Ak,CA selaku Sekertaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Drs H. Sanusi A.M., SE.,M.Si, selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Abd. Salam HB, SE, M.Si,Ak.CA selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku penulis ucapkan banyak terima kasih untuk semua bimbingannya, nasehatnya dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Pimpinan, Staf dan pegawai di SMA Muhammadiyah Pangsidi dan SMA Muhammadiyah Rappang khususnya Kepala Sekolah dan Bendahara BOS yang memberikan bantuan yang besar dalam penyusunan skripsi ini.
10. Rekan seperjuangan prodi Akuntansi angkatan 2014 khususnya kelas AK.5-14 telah menjadi teman terbaik selama perkuliahan hingga

penulisan skripsi ini, semoga keakraban dan kebersamaan kita tidak berakhir sampai disini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan dan dukungannya.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saran dan kritik dari semua pihak akan penulis hargai. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Aamiin.

*Jazaakumullahu khairan katsiran.*

Makassar, Juli 2018

Penulis

## ABSTRAK

**JUMIANTI, Tahun 2018, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang**, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Pembimbing I H. Sanusi A.M dan Pembimbing II Abd. Salam HB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Objek penelitian adalah SMA Muhammadiyah Pangsidi dan SMA Muhammadiyah Rappang yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur pada masing-masing sekolah tersebut.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

## **ABSTRACT**

**JUMIANTI, Year 2018, Transparency and Accountability in School Operational Assistance Fund Management (BOS) SMA Muhammadiyah in Sidenreng Rappang District**, Accounting Study Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. In guiding by Supervisor I Drs. H. Sanusi A.M and Advisor II Abd. Salam HB.

This study aims to determine the implementation of transparency and accountability in the management of school operational assistance funds (BOS) SMA Muhammadiyah in Sidenreng Rappang District. The research method used is qualitative method with data collection technique in the form of observation, interview, and documentation study. The object of research is SMA Muhammadiyah Pangsidi and SMA Muhammadiyah Rappang in Sidenreng Rappang District.

The result of the research shows that the implementation of transparency and accountability principle in management of school operational aid fund (BOS) of SMA Muhammadiyah in Sidenreng Rappang Regency has been good enough, that is involvement of all stakeholders from education office, school management team, teachers, employees and committee schools in planning, implementation and budget evaluation. This fact indicates that the school has conducted a budget discussion process openly in accordance with standard operating procedures at each school.

Keywords: Accountability, Transparency, School Operational Assistance Fund (BOS)

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Transparansi .....	7
B. Akuntabilitas .....	13
C. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	20
D. Penelitian Terdahulu .....	32
E. Kerangka Pikir.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40

B. Fokus Penelitian .....	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
D. Sumber data .....	40
E. Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Analisa Data.....	43
<b>BAB IV    GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Profil SMA Muhammadiyah .....	45
B. Visi dan Misi Muhammadiyah .....	46
<b>BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Anggaran Belanja Dana BOS .....	47
B. Pelaksanaan Dana BOS .....	49
C. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS .....	64
D. Hasil Penelitian .....	75
<b>BAB VI    PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 4.1	Tahapan dan Waktu Penerimaan dana BOS.....	47
Tabel 4.2	Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana BOS SMA Muhammadiyah Rappang .....	59
Tabel 4.3	Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana BOS SMA Muhammadiyah Pangsid .....	60
Tabel 4.4	Buku Kas Sekolah.....	67

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran

I Hasil Wawancara

II Data Informan Wawancara

II RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah)

III Laporan Buku Kas Sekolah

IV Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 31 UUD 1945 lebih tegas menyatakan hak warga Negara dan kewajiban Negara memberikan pendidikan kepada warganya. Pasal 31 menyatakan (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan menjadi acuan penjaminan mutu untuk komponen sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan tersebut salah satunya adalah tentang standar pembiayaannya.

Namun pada kenyataannya, saat ini masih belum semua lembaga pendidikan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Seperti yang ditulis

dalam kompas.com (2010) penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 3.600 orang tua siswa dari 720 sekolah di sejumlah tanah air, hasilnya adalah 71,61 persen orang tua tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65 persen tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS. Selain itu, 89,58 persen orang tua tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS dan memberikan saran kepada sekolah. Tidak hanya itu saja, seperti yang dituliskan dalam (harian Merdeka.com:2013) Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) bersama jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Komunitas orang tua siswa, menyatakan 87 persen sekolah tidak transparan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jumlah tersebut merupakan hasil uji akses yang dilakukan terhadap 222 sekolah sample di delapan provinsi.

Berdasarkan data dan berita yang ada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dinilai masih menjadi permasalahan yang besar. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan para pemangku kepentingan pendidikan masih cukup rendah. Selain hal tersebut dikarenakan pihak sekolah dirasa kurang transparan dan akuntabel dalam memberikan data dan informasi yang dikelola kepada semua pihak yang terkait (stakeholders).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48 dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut harus mendapatkan

penekanan dan perhatian oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Tujuannya adalah agar sistem pendidikan yang ada berjalan dengan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 pasal 2 telah dinyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus memberikan pelayanan dan informasi yang lebih baik. Artinya sekolah memberikan hak dan kemudahan akses kepada semua pihak yang berkepentingan dan terkait (stakeholder) untuk memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel.

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan pihak yang terkait (stakeholders). Sehingga persepsi yang ditimbulkan oleh publik dan pihak yang terkait (stakeholders) adalah bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa.

Sekolah yang bersih dan berwibawa artinya sekolah tersebut tidak KKN dan profesional. Pengelolaan dana merupakan pokok penting yang berkaitan dengan profesionalitas sekolah. Oleh karena itu sekolah harus melibatkan semua komponen pendidikan yang ada, baik itu komite dan pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan (stakeholders).

Pelaksanaan akuntabilitas pembiayaan sekolah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat, orang tua murid dan tentunya kepada pemerintah yang dalam kaitan ini sebagai salah satu sumber keuangan/ pendanaan pendidikan di sekolah. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah merupakan hal yang paling penting sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggara dalam memegang tanggungjawab terhadap pencapaian hasil.

#### 1. Identifikasi Masalah

Permasalahan di atas dapat diidentifikasi masalahnya bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan. Kurangnya perhatian dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dinilai rendah. Adapun beberapa faktor yang berhubungan dengan kendala dan kekurangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dana BOS dimungkinkan tidak transparan.
- b. Akuntabilitas dana BOS dimungkinkan tidak transparan.
- c. Kewenangan pengelolaan yang tidak jelas, apakah kewenangan sepenuhnya berada pada yayasan atau kepala sekolah.
- d. Pengambilan atau pungutan dana masyarakat tidak jelas.
- e. Realisasi dana BOS yang berasal dari pemerintah Provinsi yang tidak jelas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap hal tersebut penting untuk dikaji agar diketahui pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Dengan adanya keterbatasan waktu, kemampuan biaya, kemampuan penulis, dan kesempatan penulis, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang ?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yaitu “untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang !”

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus kontribusidalam menerapkan proses Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Sebagai latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan wujud pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan dengan menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama berada di perguruan tinggi.

#### b. SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang

Dapat membantu pihak SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pertimbangan pelaksanaan proses pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah guna terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik..

#### c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa program studi Akuntansi maupun mahasiswa yang lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Transparansi**

##### **1. Pengertian Transparansi**

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Tomi Victoria:2014).

Menurut Edah Jubaedah (2008:57-58) Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.”

Lebih lanjut Indra Bastian (2007:4) menyatakan bahwa, “Transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga tercipta lembaga pendidikan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan bersama.”

Selanjutnya Nico Adrianto (2007:21) menyatakan bahwa ,  
“Transparansi anggaran adalah keterbukaan kepada masyarakat dalam hal fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya. Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprhensif, akurat, dan tepat waktu.”

Dari beberapa pemaparan para tokoh mengenai definisi, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan antara para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi. Transparansi keuangan sekolah adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah memberikan makna bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sekolah memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran karena melibatkan aspirasi dan kepentingan bersama, terutama untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik, dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah.

## 2. Tujuan Transparansi

Tujuan dari penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Selain itu dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi (Novie:20017)

Fierda shafratunnisa (2015) mengemukakan, bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu:

- a. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran.
- b. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses.
- c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d. Terakomedasinya usulan/suara rakyat.
- e. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik.

Dari adanya uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya tujuan.

### 3. Manfaat Transparansi

Menurut Sri Minarti (2011,224), "Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptaakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Sedangkan Nico (2007,21) berpendapat bahwa, beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah korupsi
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
- d. Meningkatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- e. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Dari pendapat para ahli mengenai manfaat transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya transparansi merupakan suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindak kecurangan.

#### 4. Indikator Tercapainya Transparansi

Menurut IDASA yang dikutip oleh Nico (2007:21-22) bahwa keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut :

- a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
  - 1) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.

- 2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
  - 3) Adanya basis legal untuk pajak.
  - 4) Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
  - 5) Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
- 1) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran)
  - 2) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
  - 3) Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran(yang telah diauditoleh lembaga yang berwenang).
  - 4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.
  - 5) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
- c. Adanya audit yang independen dan efektif.
- 1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
  - 2) Adanya jantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
  - 3) Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.

d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

1) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.

2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Menurut Fierda shafratunnisa (2015), keberhasilan transparansi ditunjukkan oleh beberapa indikator, yaitu:

- a. Meningkatnya kepercayaan publik kepada sekolah.
- b. Meningkatnya partisipasi publik terhadap penyelenggaraan sekolah.
- c. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah, dan
- d. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sekolah.

Dari pendapat para ahli mengenai indikator pencapaian transparansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pencapaian transparansi lembaga pendidikan (sekolah) dapat melakukan keterbukaan atas berbagai aspek pelayanan, melibatkan semua *stakeholders* dalam proses anggaran maupun kegiatan yang dilaksanakan sekolah, memiliki sarana untuk menyumbangkan aspirasi *stakeholders*, dan memiliki aturan dalam melaksanakan kegiatan.

## **B. Akuntabilitas**

### **1. Pengertian Akuntabilitas**

Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, maka pihak sekolah perlu mempertanggungjawabkan pemakaian sumber dana yang telah dikelolanya. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Fierda Shafratunnisa:2015).

Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari kata account yang berarti catatan atau laporan dan ability yang berarti kemampuan. Akuntabilitas (accountability) secara umum dapat diartikan suatu bentuk pertanggung jawaban. Organisasi yang accountable adalah organisasi yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan kreatif (Tomi Victoria:2014).

Menurut Sri Minarti (2011:225) "Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas perormansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya." Lebih lanjut dijelaskan (Sulfiati:2014) bahwa Akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah

berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Miriam Budiarjo dalam Sutedi (2009:397) menjelaskan bahwa, “Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.” Mahmudi (2010:81) mengatakan “Akuntabilitas finansial, yaitu setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.”

Lebih lanjut E. Mulyasa dalam Fierda Shafratunnisa mengemukakan bahwa Akuntabilitas adalah “pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.”

Pertanggung jawaban kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah tentunya harus sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Perencanaan yang sudah ditetapkan akan menjadi dasar untuk membangun prinsip akuntabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh Surya Darma dalam Sutedjo (2009) bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- a. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- b. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- c. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Dari beberapa paparan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah yang dapat di dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

## 2. Tujuan Akuntabilitas

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan

untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik (Tomi Victoria:2014).

Dalam buku petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, dikemukakan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sekolah. Menurut Herbert Kilough dan Stretss dalam Waluyo (2007:197) manajemen suatu organisasi harus "*accountable*" untuk :

- a. Menentukan tujuan yang tepat.
- b. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- c. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
- d. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Dari adanya uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas menciptakan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan.

### 3. Manfaat Akuntabilitas

Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi Waluyo(2007:182) dimaksudkan untuk:

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
- b. Mendorong terciptanya transparansi organisasi.

- c. Mendorong partisipasi masyarakat.
- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
- f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
- g. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat menjamin kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif.

#### 4. Indikator Tercapainya Akuntabilitas

Menurut Surya Dharma dalam Sutedjo (2009) bahwa sekolah dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil kinerja sekolah dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya indikator yang jelas dan penilaian secara obyektif. Pengawasan dan pemberian sanksi yang jelas merupakan aturan main yang harus ditegakkan jika terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait akuntabilitas. Untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi, sekolah perlu mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggung jawaban. Ini perlu diupayakan untuk menjaga kepastian tentang pentingnya akuntabilitas.
- b. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- c. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun anggaran.
- d. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders.
- e. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders di akhir tahun.
- f. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pengaduan publik.
- g. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- h. Memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang ada mengenai akuntabilitas, prinsip akuntabilitas dapat dicapai berdasarkan indikator dan alat ukur yang telah ditentukan. Berikut ini beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur akuntabilitas Adrian(2009:398-399) yaitu:

a. Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- 1) pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan.
- 2) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*.
- 3) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku.
- 4) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
- 5) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

b. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- 1) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa maupun media komunikasi personal.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.

- 3) Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- 4) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

### **C. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

#### **1. Pengertian Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)**

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) triwulan sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Nanang Fattah dalam Sulfiati (2014) memberikan penjelasan mengenai biaya dalam pendidikan, bahwa biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

## **2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan dana BOS**

Manajemen atau pengelolaan keuangan sekolah harus memperhatikan beberapa prinsip (Ismi Solikhatun:2016) yaitu:

- a. Prinsip swakelola adalah direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri sedangkan prinsip partisipatif adalah melibatkan warga sekolah dan masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Prinsip transparan menekankan bahwa pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan kritik, saran serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.
- c. Prinsip akuntabel adalah pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah disepakati.
- d. Prinsip demokratis adalah penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan

musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

- e. Prinsip efektif dan efisien adalah mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- f. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan adalah sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
- g. Prinsip saling percaya adalah Pemberian dana BOS berlandaskan rasa saling percaya antara pemberi dan penerima, termasuk warga sekolah dan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pasal 59 mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan antara lain:

- a. Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- b. Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- c. Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi atas kapatutan dan tatakelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah,

penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

- d. Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan meliputi prinsip keadilan, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, demokratis, tertib administratif dan pelaporan, dan saling percaya.

### 3. Tujuan Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan buku Petunjuk teknis BOS 2017 tujuan dana BOS pada SMA/SMALB/SMK untuk :

- a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. meningkatkan angka partisipasi kasar;
- c. mengurangi angka putus sekolah;

- d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmativeaction*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
- e. memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau
- f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Bantuan dana BOS bertujuan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada sekolah, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan kepada siswa miskin mengikuti pendidikan di tiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa miskin dengan cara melibatkan peran pemda melalui BOS Daerah dan atau menerapkan subsidi silang (Fauzan,2014)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan dana BOS adalah memberikan nilai tambah keuntungan sekolah dalam mendapatkan sumber keuangan dan untuk memberikan kesempatan kepada siswa miskin mengikuti pendidikan di tiap jenjang pendidikan.

#### 4. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah

Pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari konsep mahaem keuangah sekolah yang harus direncanakan dan diatur dengan baik dan benar. Perencanaan tersebut memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah dalam menyusun dan merumuskan pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Mulyono dalam Tomi Victoria (2014) mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak lepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif.

Pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari konsep mahaem keuangah sekolah yang harus direncanakan dan diatur dengan baik dan benar. Perencanaan tersebut memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah dalam menyusun dan merumuskan pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Mulyono dalam Tomi Victoria (2014) mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak lepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif.

Dalam buku petunjuk teknis BOS, Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah bahwa BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan

dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS *mengikutsertakan* dewan guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus:

- a. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
- b. melakukan evaluasi setiap tahun;
- c. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
  - 1) RKAS memuat BOS;
  - 2) RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
  - 3) RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
  - 4) RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

Satuan Biaya BOS yang diterima oleh SMA/SMALB/SMK dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.

Satuan biaya BOS untuk SMA/SMALB dan SMK : Jumlah peserta didik x Rp 1.200.000 tiap tahunnya.

Prinsip dan tujuan pengelolaan dana BOS merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang ada. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya alat ukur dan standarisasi yang mengatur tentang pengelolaan dana BOS. Berikut ini alat ukur dan standarisasi atau indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Permendikbud No 26 Tahun 2017) sebagai berikut:

- a. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran dan untuk penyelenggara kurikulum 2006.
- b. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, penentuan peminatan/psikotest, publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya); biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; dan/atau konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.
- c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler, seperti pengadaan alat habis pakai praktikum pembelajaran, pengadaan bahan habis pakai praktikum pembelajaran, pembiayaan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka,

palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba), Pengembangan Pendidikan Karakter, sekolah sehat dan aman, dan program pelibatan keluarga di sekolah.

- d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan ujian nasional (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian, biaya konsumsi, biaya transportasi pengawas ujian dan transportasi ke dinas pendidikan);
- e. Pembelian alat/bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, CD, *flashdisk*, tinta printer, buku induk peserta didik, buku inventaris, buku rapor, buku induk guru, pembelian peralatan kebersihan sekolah, peralatan kesehatan dan keselamatan, pembiayaan pengelolaan dana BOS, pembiayaan korespondensi untuk sekolah, pembiayaan untuk *website* sekolah, pembiayaan petugas pendataan siswa pada Dapodik. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.

- f. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah seperti penyelenggaraan kegiatan MGMP, MKKS, *workshop/lokakarya*, dimana pembiayaannya meliputi fotokopi bahan/materi, pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, konsumsi, dan transportasi dan jasa profesi bagi narasumber.
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, langganan koran, majalah/publikasi yang terkait dengan pendidikan, dan iuran kebersihan/sampah. Biaya pemasangan instalasi dan penambahan listrik, biaya langganan internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- h. Pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, pembelian meja/kursi peserta didik dan guru, lantai, *plafond*, lampu, perbaikan sanitasi sekolah ( kamar mandi dan WC), perbaikan saluran air hujan, perawatan/perbaikan komputer (printer, laptop, LCD dan AC), perbaikan peralatan praktikum, pemeliharaan dan perbaikan taman sekolah atau fasilitas lainnya.
- i. Pembayaran honorarium guru pada jenjang SMA sebagai akibat pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi sebesar 15% (lima belas persen) dari total BOS yang

diterima, guru honor yang memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV, dan bukan guru yang baru direkrut setelah pengalihan kewenangan, dan guru honor tersebut wajib memperlihatkan tembusan penugasan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- j. Pembelian komputer (desktop/work station), printer dan laptop dan juga proyektor/LCD untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran.

Ketentuan Penggunaan dana BOS di Sekolah (Buku teknis penggunaan dana BOS 2017)

- a. Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- b. Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah.
- c. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- d. Bunga bank/jasa giro akibat adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS yang di terima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk:

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. Membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *software* sejenis.
- d. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studibanding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
- e. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- f. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- g. Membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya.
- h. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- i. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- j. Membangun gedung/ruangan baru.

- k. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- l. Menanamkan saham.
- m. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
- n. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

#### D. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Ismi Solikhatun (2016)	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan operasional Sekolah(BOS) (Studi pada SMK Negeri 1 Yogyakarta	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 70%, prinsip transparan dilaksanakan secara cukup baik dengan nilai kecenderungan cukup baik 78% dan sekolah telah menyebarluaskan informasi penerimaan BOS kepada warga sekolah, prinsip akuntabel dilaksanakan secara baik

				dengan nilai kecenderungan baik 96%, prinsip demokratis dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 74%, prinsip efektif dan efisien dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 63%, prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 100% dan sekolah telah melakukan pelaporan, prinsip saling percaya dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 89%.
2.	Novie Kiftiah Maries (2017)	Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan pada yayasan pendidikan <i>FULL DAY</i> mardatillah singaraja	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) yayasan Mardlatillah memperoleh sumber pendanaan dari sumbangan para donator, <i>infaq</i> anggota yayasan, iuran siswa Mardlatillah, dan bantuan Pemerintah. 2) penerapan transparansi yayasan Mardlatillah sudah cukup baik ditunjukkan dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yayasan. 3) yayasan Mardlatillah sudah menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan adanya pertanggungjawaban laporan keuangan pada saat rapat maupun publikasi melalui papan pengumuman.
3	Fauzan (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate</i>	Penelitian ini Menggunakan Metode Analisis Regresi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen secara

		<i>Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah</i>	ilinear Berganda.	simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Transparansi yang paling dominan mempengaruhi pengelolaan dana BOS.
4	Tutus Julantika (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan dana BOS dinilai dari jumlah dana BOS yang direncanakan dengan dana BOS yang digunakan. Kesesuaian penggunaan di sini dilihat dari angka ratio yang ditunjukkan. Ratio dalam penelitian ini adalah angka yang menunjukkan kemampuan sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan dana BOS yang sudah direncanakan di awal pembelajaran.
5	Giyanto (2013)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri Belah I Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif	Perencanaan dana BOS di SD Negeri Belah I dilaksanakan secara transparan dilihat dari aspek orientasi tujuan, proses penyusunan dan keterlibatan guru, komite sekolah dan orang tua siswa. Kondisi SDM dalam mengelola keuangan BOS dilakukan oleh bendahara dibantu kepala sekolah,

				partisipasi para guru, dan partisipasi komite sekolah.
6	Sulfiati F (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sinjai	Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kab. Sinjai, meliputi (a) Pelaksanaan pengelolaan dana BOS, (b) Evaluasi pengelolaan dana BOS. (2) Faktor- faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana BOS di sekolah yaitu keterlambatan dalam penyaluran dana BOS dan ICT yang tidak mendukung dalam pengerjaan dan pengiriman pelaporan BOS.

Ismi Solikhatus (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) Studi pada SMK Negeri 1 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 70%, prinsip transparan dilaksanakan secara cukup baik dengan nilai kecenderungan cukup baik 78% dan sekolah telah menyebarluaskan informasi penerimaan BOS kepada warga sekolah, prinsip akuntabel dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 96%, prinsip demokratis dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 74%, prinsip efektif dan efisien dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 63%, prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 100% dan

sekolah telah melakukan pelaporan, prinsip saling percaya dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 89%.

Novie Kiftiah Maries (2017) melakukan penelitian dengan judul Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan pada yayasan pendidikan *FULL DAY* mardatillah singlaraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) yayasan Mardlatillah memperoleh sumber pendanaan dari sumbangan para donator, *infaq* anggota yayasan, iuran siswa Mardlatillah, dan bantuan Pemerintah. 2) penerapan transparansi yayasan Mardlatillah sudah cukup baik ditunjukkan dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yayasan. 3) yayasan Mardlatillah sudah menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan adanya pertanggungjawaban laporan keuangan pada saat rapat maupun publikasi melalui papan pengumuman.

Fauzan (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Penelitian ini Menggunakan Metode Analisis Regresi Liniar Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Partisipasi masyarakat

berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Transparansi yang paling dominan mempengaruhi pengelolaan dana BOS.

Tutus Juntika (2017) melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan dana BOS dinilai dari jumlah dana BOS yang direncanakan dengan dana BOS yang digunakan. Kesesuaian penggunaan di sini dilihat dari angka ratio yang ditunjukkan. Ratio dalam penelitian ini adalah angka yang menunjukkan kemampuan sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan dana BOS yang sudah direncanakan di awal pembelajaran.

Giyanto (2013) melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) DI Sekolah Dasar Negeri Belah 1 Kecamatan Donorojo Pacitan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan dana BOS di SD Negeri Belah I dilaksanakan secara transparan dilihat dari aspek orientasi tujuan, proses penyusunan dan keterlibatan guru, komite sekolah dan orang tua siswa. Kondisi SDM dalam mengelola keuangan BOS dilakukan oleh bendahara dibantu kepala sekolah, partisipasi para guru, dan partisipasi komite sekolah.

Sulfiati F (2014) melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kab. Sinjai, meliputi (a) Pelaksanaan pengelolaan dana BOS, (b) Evaluasi pengelolaan dana BOS. (2) Faktor- faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana BOS di sekolah yaitu keterlambatan dalam penyaluran dana BOS dan ICT yang tidak mendukung dalam pengerjaan dan pengiriman pelaporan BOS.

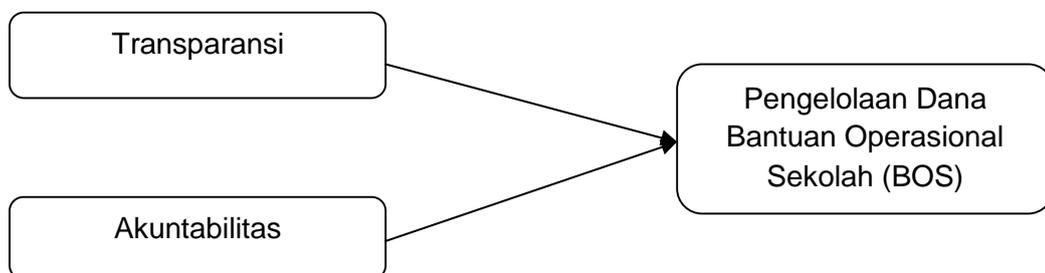
### **E. Kerangka Pikir**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah. Lembaga pendidikan yang tidak transparan akan menimbulkan kecenderungan publik berpikir negatif. Keterbatasan akses informasi yang diberikan akan membuat publik merasa tidak percaya terhadap lembaga pendidikan yang ada.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Lembaga pendidikan yang tidak akuntabel akan menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan. Publik akan berpikir bahwa lembaga pendidikan yang ada tidak

profesional dan menduga adanya praktik KKN dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada lembaga pendidikan tersebut.

Lembaga pendidikan yang transparan akan menimbulkan dampak positif terhadap publik. Keterbukaan dan kebebasan akses informasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan akan membuat publik semakin percaya. Selain itu lembaga pendidikan yang akuntabel akan menimbulkan dampak positif dan kepercayaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang ada. Sehingga publik akan menilai bahwa lembaga pendidikan tersebut profesional dan tidak KKN. Dengan demikian pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional yang ada.



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sanusi (2011:13), desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

#### **B. Fokus Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada sekolah SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Waktu penelitian diperkirakan pada bulan April sampai Juni 2018.

#### **D. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

### 1. Data primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file - file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. (Tutus Julantika:2017).

Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari koresponden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang berkompeten dan memahami pengelolaan dana Bantuan Operasional (BOS) dalam hal ini Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Komite Sekolah .

### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. (Tutus Julantika:2017) Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari pihak ketiga atau dokumen – dokumen terkait dan dokumentasi pada SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang nantinya digunakan sebagai pengukuran terhadap variabel. Metode yang

digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai metode utama adalah metode *interview* (wawancara), metode dokumentasi, dan metode observasi.:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, Sanusi (2011 :105).

Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar – benar berkompeten dalam hal ini Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Komite Sekolah agar memperoleh data yang lebih lengkap dan juga valid yang mungkin tidak terdapat pada dokumen. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam untuk semakin memudahkan penulis dalam penulisan hasil wawancara karena akan diperoleh data yang lebih akurat dan dapat lebih mudah dalam memasukkannya ke laporan hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengumpulkan, menganalisa, dan pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi mengenai keterangan atas hal – hal yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan. Pengumpulan data sekunder dengan mengidentifikasi data yang diperoleh dari dokumen yang dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara (Tutus Julantika,2017)

## 3. Observasi

Menurut Sanusi (2011 : 77), Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian kasus, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya sekedar daftar cek atau sekedar penilaian.

## **F. Teknik Analisa Data**

Untuk analisi data, peneliti akan melakukan analisis data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dokumentasi, serta sumber data yang telah ada untuk dapat disimpulkan. Serta teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Sugiyono (2009,247-253) menjelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi data adalah membuat kategori berdasarkan macam atau jenis yang sama, membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
2. Penyajian data adalah melakukan penyajian dengan memisahkan pola yang berbeda sesuai dengan jenis dan macamnya sehingga strukturnya mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan adalah kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat dua sekolah yaitu SMA Muhammadiyah Rappang dan SMA Muhammadiyah Pangsidi. SMA Muhammadiyah Rappang terletak di jalan Rumah Sakit No. 12 Rappang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan SMA Muhammadiyah pangsidi terletak di jalan Ganggawa No. 151 Pangkajene Kelurahan Majelling Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan catatan sejarah SMA Muhammadiyah Rappang didirikan sejak tahun 1979 sedangkan SMA Muhammadiyah Pangsidi didirikan pada tahun 1980.

Sekolah SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk sekolah Swasta yang dimiliki oleh yayasan Muhammadiyah yang berkecimpung dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan nilai akreditasi B dari Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

baik sekolah negeri maupun swasta yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.

## **B. Visi dan Misi Muhammadiyah**

Visi : Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil'alamin menuju terciptanya/terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Misi : 1). Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw.

2). Memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.

3). Menyebar luaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.

4). Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Anggaran Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan anggaran belanja sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, dimana anggaran pendidikan itu bersumber dari anggaran Negara yang harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Penyaluran dana BOS dilakukan berdasarkan surat usulan yang diterima, yaitu atas Surat Pengusulan Permohonan Bantuan (SPPB) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, surat tersebut dimasukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk diproses. Berdasarkan surat tersebut dana BOS dialokasikan dari pusat ke provinsi, dana yang telah masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi akan langsung disalurkan kepada masing-masing rekening sekolah SMA Muhammadiyah di Kabupaten Rappang.

Pemerintah Pusat menetapkan alokasi Dana BOS tiap provinsi/kabupaten/kota melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu besarnya Dana BOS yang diterima itu sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut, jadi Dana yang diterima oleh sekolah besarnya bervariasi tergantung pada jumlah murid yang diajukan oleh setiap sekolah.

Dana BOS yang yang diterima oleh SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Ajaran 2017 sebesar Rp 288.680.000, dimana Dana BOS untuk SMA Muhammadiyah Rappang sebesar Rp 98.280.000 dan untuk SMA Muhammadiyah Pangsidi sebesar Rp190.400.000. Pencairan dana BOS dilakukan empat kali penerimaan. Yakni triwulan pertama di terima pada bulan Juni 2017, Triwulan kedua diterima pada bulan September 2017, Triwulan ketiga diterima pada bulan November 2017 dan Triwulan keempat diterima pada bulan Desember 2017 rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Sesuai Petunjuk Teknis (JUKNIS) Dana BOS yang diterima akan diperuntukan untuk membiayai pengeluaran seperti Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Pembiayaan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan ujian nasional, Pembelian alat/bahan habis pakai, Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, Pembiayaan langganan daya dan jasa, Pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah, Pembayaran honorarium guru pada jenjang SMA, Pembelian komputer (desktop/work station), printer dan laptop dan juga proyektor/LCD.

Tabel 4.1

## Tahapan dan Waktu Penerimaan Dana BOS SMA Muhammadiyah

Sekolah	Triwulan	Jumlah	Tanggal Diterima
SMA Muhammadiyah Rappang	I	Rp 21.560.000	12 Juni 2017
	II	Rp 44.240.000	27 September 2017
	III	Rp 22.120.000	27 November 2017
	IV	Rp 10.360.000	18 Januari 2018
SMA Muhammadiyah Pangsid	I	Rp 39.200.000	20 Juni 2017
	II	Rp 81.760.000	25 September 2017
	III	Rp 40.880.000	16 November 2017
	IV	Rp 28.560.000	22 Desember 2017
Total		Rp288.680.000	

Sumber : Data primer diolah, Tahun 2017

## B. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

### 1. Perencanaan penggunaan Dana BOS

Dalam pembuatan perencanaan dana BOS di SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang diawali dengan pembuatan RKAS, sekolah membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai wewenangnya. RKAS disusun sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS, dengan adanya RKAS maka pihak sekolah dapat merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dari Dana BOS selama satu tahun. Penyusunan RKAS berdasarkan atas kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia untuk jangka pendek,

menengah, hingga panjang. Kegiatan yang paling diprioritaskan untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera. Seperti yang diungkapkan Jamal Ma'mur Asmani:

“Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagai mana diamanatkan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu “Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;” RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran.

Dari teori diatas untuk mengetahui perencanaan dana BOS di SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang berkaitan langsung dalam pengelolaan dana BOS, yaitu Kepala sekolah SMA Muhammadiyah Rappang dan SMA Muhammadiyah Pangsidi, Bendahara BOS, sebagian guru, dan perwakilan tenaga kependidikan untuk mengkonfirmasi dengan program/kegiatan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan program dana BOS.

“Dalam proses penyusunan RKAS guru, komite dan staff dilibatkan untuk mengumpulkan masing-masing kegiatan yang yang dibutuhkan dan Tim Manajemen BOS akan mempertimbangkan” kata guru sekolah SMA Muhammadiyah Pangsid.

Lalu, kepala sekolah dan Tim Manajemen melakukan analisis kebutuhan untuk menaksir biaya pendidikan yang akan dikeluarkan selama satu tahun ajaran. Setelah melakukan analisis, pihak guru dan karyawan melakukan rencana anggaran biaya dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun ajaran. Selanjutnya pengajuan rencana dana kebutuhan nantinya disetujui oleh Kepala Sekolah dan Kepala Keuangan.

Adapun hasil rapat yaitu rencana keluaran anggaran sekolah(RKAS) Dana BOS itu disusun sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) yang ada, dimana mencakup tentang penyusunan anggaran kebutuhan pokok dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran selama satu tahun. RKAS yang di susun di SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun ajaran 2017/2018 seperti berikut.

1. Rencana pengeluaran dana BOS SMA Muhammadiyah Rappang pada tahun ajaran 2017/2018 dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan sebesar Rp 8.187.500, penerimaan peserta didik baru sebesar Rp 3.480.000, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp 15.252.000, pembiayaan kegiatan ulangan harian, UTS, UAS, UKK, US, UNBK, USBN sebesar Rp 12.384.000, pengelolaan sekolah sebesar Rp 12.384.000, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah

sebesar Rp 7.013.000, langganan daya dan jasa sebesar Rp 6.477.000, pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp 21.633.000, pembayaran honorer, dan pembelian alat multimedia pembelajaran sebesar Rp 10.750.000.

2. Rencana pengeluaran dana BOS SMA Muhammadiyah Pangsidi pada tahun ajaran 2017/2018 dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan sebesar Rp 26.720.000, penerimaan peserta didik baru sebesar Rp 3.960.000 kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp 26.250.000, pembiayaan kegiatan ulangan harian, UTS, UAS, UKK, US, UNBK, USBN sebesar Rp 30.989.000, pengelolaan sekolah sebesar Rp 16.831.000, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah sebesar Rp 4.870.000, langganan daya dan jasa sebesar Rp 32.058.000, pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp 16.307.000, pembayaran honorer sebesar Rp 11.215.000, dan pembelian alat multimedia pembelajaran sebesar Rp 21.200.000.

Dalam pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan yang didalamnya terdapat pembuatan RKAS di SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan dengan baik, dengan adanya tanggungjawab dari setiap penanggungjawab tiap kegiatan serta dalam pembuatannya sudah melibatkan seluruh komponen

sekolah. Dengan demikian sekolah telah memberikan informasi dana kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun ajaran.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana BOS dalam proses perencanaan Dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah cukup baik, yaitu adanya keterlibatan tim manajemen, guru, dan karyawan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran Dana BOS berupa RKAS untuk rencana kegiatan satu tahun.

## 2. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS harus disesuaikan dengan hasil rapat yang tersusun dalam rencana anggaran kegiatan sekolah (RKAS). Apabila ada perubahan rencana, pihak sekolah perlu membuat rencana anggaran perubahan ke pemerintah pusat. Dalam penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS, disamping dana yang diperoleh dari sumber lain.

Berdasarkan Pedoman Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan Dana BOS yang diterima oleh sekolah SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya pada RKAS. Realisasi penggunaan dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun ajaran 2017/2018 sebagai berikut.

- a. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran sebesar Rp 34.910.500 yang terdiri dari pembelian buku teks pelajaran SMA Muhammadiyah Rappang pada Triwulan II Rp 8.187.500 dan pembelian buku teks pelajaran SMA Muhammadiyah Pangsid pada Triwulan II Rp 26.723.000.
- b. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru sebesar Rp 6.780.000, yang terdiri dari biaya kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru SMA Muhammadiyah Rappang sebesar Rp 3.480.000 dan biaya kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru SMA Muhammadiyah pangsid sebesar Rp 3.300.000. dimana kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yang terdiri dari kegiatan administrasi pendaftaran sebesar Rp 780.000, pembuatan spanduk sebesar Rp 2.960.000 dan brosur sebesar Rp 660.000, serta biaya konsumsi sebesar Rp 780.000 dan transportasi dalam penyelenggaraan kegiatan sebesar Rp 1.600.000.
- c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler sebesar Rp 43.123.000, yang terdiri dari biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler SMA Muhammadiyah Rappang sebesar Rp 15.252.000 dan biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler SMA Muhammadiyah pangsid sebesar Rp 27.871.000. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler seperti kegiatan pengadaan alat habis pakai praktikum pembelajaran sebesar Rp 13.444.000, pengadaan bahan habis pakai praktikum pembelajaran sebesar Rp

3.941.000, pembiayaan pembelajaran pengayaan sebesar Rp 1.700.000, pembayaran kegiatan olahraga Rp 3.580.000, pembayaran kegiatan kesenian sebesar Rp 2.008.000 , transportasi guru dan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan lomba olahraga volly,takrow,tenis meja, kegiatan pramuka, pancak silat sebesar Rp 13.110.000, pembayaran konsumsi guru dan siswa kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka HUT RI ke 72 sebesar Rp 3.160.000, dan pembayaran insentif guru pembina pancak silat dan pramuka sebesar Rp 2.080.000.

- d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan ujian nasional sebesar Rp 36.004.000, yang terdiri dari biaya semua kegiatan ulangan SMA Muhammadiyah Rappang sebesar Rp 4.887.000 dan biaya semua kegiatan ulangan SMA Muhammadiyah pangsid sebesar Rp 31.117.000. pembiayaan kegiatan ulangan seperti kegiatan fotocopi/ penggandaan soal dan fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian sebesar Rp 6.671.000, biaya konsumsi kegiatan sebesar Rp 6.876.000, biaya transportasi pengawas ujian dan transportasi ke dinas pendidikan sebesar Rp 9.720.000, dan biaya pemasangan server untuk UNBK sebesar Rp 10.000.000.
- e. Pembelian alat/bahan habis pakai sebesar Rp 41.261.580, yang terdiri dari pembelian bahan habis pakai SMA Muhammadiyah Rappang sebesar Rp 22.291.580 dan pembelian bahan habis pakai

SMA Muhammadiyah pangsud sebesar Rp 18.970.000. pembiayaan bahan habis pakai itu seperti pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, CD, *flashdisk*, tinta printer, buku induk peserta didik, buku inventaris, buku rapor, buku induk guru sebesar Rp 28.334.580, pembelian peralatan kebersihan sekolah seperti tempat sampah, sapu ijuk, fortex dll sebesar Rp 4.145.000, peralatan kesehatan dan keselamatan sebesar Rp 762.000, pembiayaan pengelolaan dana BOS sebesar Rp 3.670.000, pembiayaan petugas pendataan siswa pada Dapodik sebesar Rp 4.350.000.

- f. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah sebesar Rp 9.505.000, yang terdiri dari biaya pengembangan profesi guru SMA Muhammadiyah Rappang sebesar Rp 5.320.000 dan biaya pengembangan profesi guru SMA Muhammadiyah pangsud sebesar Rp 4.185.000. dimana pembiaya rapat bulanan sekolah Rp 4.395.000, Pembiayaan pengembangan profesi guru seperti kegiatan penyelenggaraan kegiatan MGMP mata pelajaran TIK dan bahasa indonesia, RPP sebesar Rp 1.100.000 dan juga biaya transportasi kegiatan pembuatan RPP dan kegiatan MGMP sebesar Rp 4.010.000.
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa sebesar Rp 38.240.000, yang terdiri dari biaya langganan daya dan jasa SMA Muhammadiyah Rappang sebesar Rp 6.477.080 dan biaya langganan daya dan jasa

SMA Muhammadiyah pangsid sebesar Rp 31.763.000. dimana pembiayaan langganan daya dan jasa seperti pembiayaan listrik sebesar Rp 5.728.000, pembayaran Air PDAM sebesar Rp 473.000, telepon sebesar Rp 750.000, langganan koran ( koran indonesia pos dan koran fajar) dan majalah/publikasi yang terkait dengan pendidikan sebesar Rp 4.200.000, dan iuran kebersihan/sampah sebesar Rp 2.372.000, Biaya pemasangan instalasi sebesar Rp 2.120.000 dan bayar material listrik sebesar Rp 1.298.000, biaya modem sebesar Rp 3.000.000, dan biaya pemasangan server di sekolah sebesar Rp 18.000.000.

- h. Pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp 36.488.500, yang terdiri dari biaya perawatan sarana dan prasarana SMA Muhammadiyah Rappang sebesar Rp 21.633.500 dan biaya perawatan sarana dan prasarana SMA Muhammadiyah pangsid sebesar Rp 14.855.000. pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah seperti pembiayaan kegiatan pengecatan Rp 4.426.000, perbaikan atap sebesar Rp 1.050.000, perbaikan pintu dan jendela sebesar Rp 1.300.000, pembelian kipas angin sebesar Rp 7.020.000, lantai, *plafond*, lampu, perbaikan sanitasi kamar mandi dan WC sebesar Rp 3.038.000, perawatan/perbaikan komputer seperti instal ulang printer dan laptop sebesar Rp 1.355.000, perbaikan peralatan praktikum komputer sebesar Rp

1.117.000, pemeliharaan dan perbaikan taman sekolah sebesar Rp 2.448.000 dan perbaikan lapangan olahraga sebesar Rp 11.088.000.

- i. Pembayaran honorarium guru pada jenjang SMA sebesar Rp 10.416.000, yang terdiri dari pembayaran honorer kepada guru SMA Muhammadiyah pangsidi sebesar Rp 10.416.000 yang dibayarkan pada triwulan III dan triwulan IV.
- j. Pembelian alat multimedia pembelajaran sebesar Rp 31.950.000, yang terdiri dari pembelian alat multimedia SMA Muhammadiyah Rappang sebesar Rp 10.750.000 dan pembelian alat multimedia SMA Muhammadiyah pangsidi sebesar Rp 21.200.000. dimana Pembelian alat multimedia pembelajaran yaitu seperti pembelian komputer dan laptop merk ASUS sebesar Rp 25.600.000), pembelian printer merk EPSON L120 sebesar Rp 5.100.000, pembelian Hardisk 1 unit sebesar Rp 900.000 dan modem satu unit sebesar Rp 350.000.

Penggunaan dana BOS yang telah disebutkan diatas sudah sesuai dengan hasil rapat yang telah disusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS). Dimana Dana yang diterima oleh sekolah khusus dana BOS penggunaannya untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam pedoman petunjuk teknis BOS.

Dari pemaparan diatas berdasarkan teori mengenai penggunaan dana BOS dapat disimpulkan bahwa SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan dana BOS sebagaimana

mestinya, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai aturan penggunaan dana BOS. Hal ini dibuktikan dengan hasil studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada pihak SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Rencana anggaran dan realisasi penggunaan Dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun ajaran 2017/2018 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2

**Rencana anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana BOS SMA Muhammadiyah Rappang Tahun 2017**

No Urut	Uraian	Rencana anggaran	Realisasi Penggunaan	Ket	Persen penggunaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Perpustakaan	Rp 8.187.500	Rp 8.187.500	-	100%
2	Penerimaan peserta didik baru	Rp 3.480.000	Rp 3.480.000	-	100%
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp 15.252.000	Rp 15.252.000	-	100%
4	Pembiayaan kegiatan ulangan harian, UTS, UAS, UKK, US, UNBK, USBN	Rp 4.887.000	Rp 4.887.000	-	100%
5	Pengelolaan sekolah	Rp 22.291.580	Rp 22.291.580	-	100%
6	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah	Rp 5.320.000	Rp 5.320.000	-	100%
7	Langganan daya dan jasa	Rp 6.477.080	Rp 6.477.080	-	100%
8	Pemeliharaan perawatan sarana dan prasana sekolah	Rp 21.633.500	Rp 21.633.500	-	100%
9	Pembayaran honorer			-	100%
10	Pembelian alat multimedia pembelajaran	Rp 10.750.000	Rp 10.750.000	-	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2017

Tabel 4.5

**Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana BOS SMA  
Muhammadiyah Pangsidi Tahun 2017**

No	Uraian	Rencana Anggaran	Realisasi Penggunaan	Ket	Persen penggunaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pengembangan Perpustakaan	Rp 26.720.000	Rp 26.720.000	-	100%
2	Penerimaan peserta didik baru	Rp 4.700.000	Rp 3.300.000	Rp 1.400.000	70%
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp 16.250.000	Rp 27.871.000	-Rp 11.621.000	-
4	Pembiayaan kegiatan ulangan harian, UTS, UAS, UKK, US, UNBK, USBN	Rp 24.989.000	Rp 31.117.000	-Rp 6.128.000	-
5	Pengelolaan sekolah	Rp 9.831.000	Rp 18.970.000	-Rp 9.139.000	-
6	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah	Rp 4.870.000	Rp 4.185.000	Rp 685.000	86%
7	Langganan daya dan jasa	Rp 39.058.000	Rp 31.693.000	Rp 7.365.000	81%
8	Pemeliharaan perawatan sarana dan prasana sekolah	Rp 16.307.000	Rp 14.855.000	Rp 1.452.000	91%
9	Pembayaran honorer	Rp 27.215.000	Rp 10.416.000	Rp 16.799.000	38%
10	Pembelian alat multimedia pembelajaran	Rp 21.200.000	Rp 21.200.000	-	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2017

### 3. Mekanisme pengelolaan Dana BOS

Proses pengambilan dana BOS dilakukan melalui bank penyalur dari pemerintah pusat/daerah ke rekening sekolah. Pengambilan dana

BOS dilakukan oleh Bendahara Sekolah/Bendahara BOS atas persetujuan Kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan berlaku. Pencairan dana BOS di SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak semua langsung dicairkan pada saat pengambilan, namun dilakukan sesuai kebutuhan yang akan dilaksanakan segera. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sekolah SMA Muhammadiyah Pangsidi, mengatakan bahwa

“proses pengambilan dana BOS dilakukan di bank dan yang bertugas mengambil dana BOS dilakukan oleh Bendahara BOS”. Lebih jelas Bendahara SMA Muhammadiyah Rappang mengatakan bahwa: “Proses pengambilan dana di bank menggunakan cek giro dengan bukti tanda tangan Kepala Sekolah, lalu yang bertugas mengambil dana BOS adalah bendahara BOS yang nantinya pada proses pengambilan di bank menunjukkan bukti KTP”

Dalam melakukan belanja Dana BOS itu harus dengan persetujuan bendahara dan kepala sekolah dimana bendahara dan kepala sekolah harus tanda tangan setiap transaksi pembelian yang dilakukan. Setiap pembelian barang itu harus disertai dengan bukti yang tertulis baik berupa faktur atau kwitansi yang telah ditandatangani oleh toko tempat kita membeli barang tersebut.

Pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang itu dicatat di buku Kas sekolah, dimana penerimaan Dana BOS itu di catat di buku Kas sekolah sebagai penerimaan (Debet), sedangkan pada saat pengeluaran Dana BOS itu juga di catat di buku Kas sekolah sebagai

pengeluaran (Kredit). Adapun bentuk Buku Kas SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4  
Format  
Buku Kas Sekolah

Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Kepala Sekolah

Bendahara

(.....)

(.....)

Jumlah pengeluaran dan penerimaan serta saldo Dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada lampiran di belakang.

#### 4. Pelaporan Dana BOS

Pelaporan dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari pelaporan penggunaan dana BOS yang dilaporkan untuk pihak internal maupun pihak eksternal dan publikasi yang dilakukan oleh sekolah terkait pengelolaan Dana BOS.

Data pelaporan diperoleh dari wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara BOS serta dokumentasi. Pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah dengan memberikan laporan pengelolaan dana BOS pada setiap akhir periode dana BOS. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan dana BOS adalah Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Pusat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan di SMA Muhammadiyah Pangsid dan SMA Muhammadiyah Rappang.

“sekolah harus membuat laporan sesuai format dalam buku pedoman. Waktu pelaporan dana BOS tiap akhir periode. Laporan tersebut diberikan kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan untuk sekolah”

“pelaporan dana BOS tiap akhir periode. Laporan disusun oleh Tim Manajemen BOS dan terkhusus disusun oleh Bendahara BOS. Laporan diberikan kepada dinas pendidikan pusat, provinsi, kabupaten dan sekolah”.kata Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Pangsid.

Kegiatan pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah di buat oleh Tim Manajemen BOS dan secara khusus oleh Bendahara BOS. Menurut Buku Petunjuk Teknis BOS, laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.

Dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana BOS sebagai bentuk tanggungjawab sekolah terhadap penggunaan dana BOS yang dipergunakan untuk kegiatan atau program sekolah. SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan

pertanggungjawaban dana BOS sesuai dengan peraturan dalam JUKNIS BOS. Hal ini sebagai bukti bahwa SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **C. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS**

#### **1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS**

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi mengenai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dana BOS, merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam menjalankan undang-undang sistem pendidikan nasional tentang pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan di sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah.

Menurut Nico (2007:21-22) Indikator pencapaian transparansi pada lembaga pendidikan (sekolah) yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi, adanya akses stakeholder terhadap transparansi anggaran, adanya audit yang independen dan efektif, dan adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan keputusan anggaran.

Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Sma Muhammadiyah Rappang dan SMA Muhammadiyah Pangsid, peneliti melakukan metode wawancara, observasi dan studi dokumen yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana BOS, yaitu wawancara dilakukan kepada kepala sekolah bendahara sekolah, dan guru yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana BOS. Transparansi itu dilakukan mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, penggunaan dan pengawasan Dana BOS.

a. Transparansi dalam perencanaan dana BOS

Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan. SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang membangun kepercayaan stakeholder dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan kegiatan siswa setiap tahunnya, tentunya dengan memberikan informasi anggaran yang harus dibayarkan siswa petahun. Hal tersebut sesuai dengan jawaban dari beberapa informan seperti penuturan kepala sekolah SMA Muhammadiyah Rappang, bahwa keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran sekolah, yaitu:

“kita terbuka terhadap stakeholder yang berkepentingan, yaitu melibatkan tim manajemen dan komite dalam merencanakan biaya pendidikan peserta didik dalam satu tahun ajaran, guru dan karyawan

mengajukan kebutuhan selama satu tahun dan membuat daftar usulan anggaran kegiatan“.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat kepala sekolah SMA Muhammadiyah pangsidi yang mengatakan bahwa:

“kita dalam melakukan perencanaan anggaran itu terlebih dahulu kita melakukan rapat untuk membuat rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) yang melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, komite, dan guru, sehingga Dana BOS yang ada bisa diperuntukan pada semua kebutuhan yang kita butuhkan pada saat proses belajar mengajar dalam satu tahun”.

Lebih dijelaskan lagi oleh Bendahara sekolah SMA Muhammadiyah Pangsidi bahwa:

“dalam membuat Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) itu kita membuat dengan mempedomani atau berdasarkan pada petunjuk teknis (JUKNIS) pengelolaan Dana BOS tahun 2017”.

Dari beberapa pendapat informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi dalam perencanaan Dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan dengan cukup baik dengan terpenuhinya indikator transparansi yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk dipedomani dalam menyusun RKAS dan juga adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan RKAS.

#### b. Transparansi dalam pencatatan Dana BOS

Transparansi dalam pencatatan Dana BOS pada SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan agar stakeholder percaya dengan pengelolaan Dana BOS karna adanya keterbukaan pencatatan setiap melakukan kegiatan dibuktikan dengan

adanya bukti-bukti fisik dari setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan jawaban dari beberapa informan seperti kepada kepala sekolah SMA Muhammadiyah Pangsid yang mengatakan bahwa pencatatan itu dapat dilakukan dengan:

“Jadi dalam pengelolaan anggaran dana bos itu memang kita diwajibkan untuk melakukan pencatatan secara terbuka makanya setiap pertemuan kita memperlihatkan buku kas sekolah dimana setiap dana yang terpakai, dana yang masuk dan dana itu diperuntukan untuk apa dapat diketahui oleh semua guru, komite dan semua pihak-pihak sekolah yang aktif”.

Begitupun dengan pernyataan salah satu guru yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana BOS yang menyatakan bahwa:

“Pencatatan Dana BOS itu dicatat di buku kas sekolah, dimana setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran itu dicatat di buku kas sekolah sehingga dapat diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan kepada setiap stakeholder yang ingin melihat jumlah saldo dan pengeluaran yang terjadi”.

Lebih diperjelas lagi oleh ibu Bendahara kepala sekolah SMA Muhammadiyah Rappang yang mengatakan bahwa:

“dalam melakukan pencatatan anggaran Dana BOS kita harus menyertakan kwitansi sebagai bukti pengeluaran dana yang akan dicocokkan pada saat pencatatan”.

Dari beberapa pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pencatatan Dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang itu sudah sesuai dengan indikator transparansi yaitu adanya akses stakeholder terhadap pencatatan anggaran, dimana setiap pencatatan itu sudah tersedia di buku kas sekolah dan disertai dengan bukti-bukti transaksi yang dilakukan.

c. Transparansi dalam penggunaan Dana BOS

Transparansi dalam penggunaan Dana BOS pada SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan agar stakeholder percaya dengan pengelolaan Dana BOS karna adanya akses stakeholder terhadap penggunaan anggaran dimana sekolah harus terbuka tentang penggunaan anggaran dan dapat diumumkan serta dipublikasikan setiap hasil laporan anggaran. Dalam penggunaan anggaran Dana BOS juga harus sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan jawaban beberapa informan seperti kepada kepala sekolah SMA Muhammadiyah Rappang yang menjelaskan penggunaan Dana BOS, bahwa :

“Kami menggunakan anggaran dana BOS itu untuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam RKAS untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan program kegiatan sekolah, dan membuat laporan pertanggungjawaban disertai dengan kwitansi atau bukti fisik.”

Selanjutnya bendahara sekolah SMA Muhammadiyah Rappang mengatakan bahwa:

“Dalam penggunaan Dana BOS itu guru, karyawan, dan orang tua siswa saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat terealisasi sesuai dengan RKAS yang telah direncanakan sebelumnya”.

Kemudian menurut Kepala sekolah SMA Muhammadiyah Pangsid

Transparansi dalam penggunaan Dana BOS itu harus di publikasikan, berikut penjelasannya:

“Jadi semua penggunaan anggaran Dana BOS itu kita publikasikan melalui dokumen laporan pertanggung jawaban yang selalu tersedia di ruang guru serta mempublikasikannya melalui papan informasi

sekolah sehingga dengan mudah stakeholder atau orang yang berkepentingan dengan mudah melihat penggunaan anggaran Dana BOS tersebut.

Penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan cukup baik karna sudah sesuai dengan indikator, dengan adanya kerangka kerja yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari setiap pertanggungjawaban kegiatan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan dapat memberikan informasi anggaran dana kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran, untuk memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan khususnya pihak internal dan eksternal yaitu dengan adanya dokumen dan bukti-bukti lainnya.

Dari adanya pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta memberikan kesempatan kepada warga sekolah dalam proses pembuatan RKAS dengan adanya keterlibatan guru dan karyawan dalam Tim Manajemen BOS dalam menentukan anggaran kegiatan sekolah serta untuk kegiatan proses belajar mengajar, dan juga informasi dengan mudah dapat diketahui karna pihak sekolah telah mempublikasikan melalui papan informasi sekolah.

d. Transparansi dalam Pengawasan Dana BOS

Transparansi dalam Pengawasan dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari pengawasan intern sekolah dan pengawasan dari ekstern sekolah. Pihak intern sekolah yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten bersama dengan pengawas sekolah. Pengawas dari pihak ekstern sekolah adalah Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan jawaban beberapa informan seperti kepada kepala sekolah SMA Muhammadiyah Pangsidi yang menjelaskan penggunaan Dana BOS, bahwa :

“Ini memang ada timnya di Dinas Pendidikan, biasanya itu untuk pengawasan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi itu ada tim dari Dinas Pendidikan dan untuk evaluasi penggunaan dana BOS selalu di laksanakan di Dinas pendidikan Provinsi jadi setiap satu triwulan selalu di pertanggungjawabkan di Dinas pendidikan Provinsi”.

selanjutnya menurut penjelasan dari bendahara SMA Muhammadiyah Rappang mengatakan bahwa:

“Komponen utama yang dimonitor oleh pengawas sekolah yaitu alokasi dana, penyaluran dana, penggunaan dana, pelaporan dan lain-lain yang terkait dengan pengelolaan dana BOS”.

Kemudian menurut guru SMA Muhammadiyah Rappang mengatakan bahwa:

“Pengawasan dilakukan oleh sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi. Pemantauan yang dilakukan dalam hal Pelaksanaan penggunaan Dana BOS, Pemantauan terkait pengecekan kesesuaian dana dengan bukti-bukti yang ada”.

Dari beberapa pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi pengawasan Dana BOS sudah sesuai dengan

indikator karna adanya lembaga audit yang independen dan efektif yang bertujuan untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat dan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Dengan adanya beberapa hasil wawancara dari informan mengenai tentang transparansi perencanaan, pencatatan, penggunaan, dan pengawasan dana BOS, Maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi pengelolaan Dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah cukup baik karna sudah memenuhi indikator pencapaian transparansi. Dimana dalam pembuatan rencana anggaran kegiatan sekolah (RKAS) disusun sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan sudah melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite dan guru, pencatatannya disertai dengan bukti-bukti yang dicatat di buku kas sekolah setiap terjadi transaksi, penggunaan sudah terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah buat serta pengawasan dana BOS sudah diawasi oleh pihak dinas pendidikan yang terkait.

## 2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana sekolah pemerintah.

Sumber dana yang didapatkan oleh sekolah yaitu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sumber dana tersebut digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Indikator akuntabilitas menurut Adrian (2009:398-399) yaitu pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan, Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

Penerapan Akuntabilitas dapat dilihat dari Akuntabilitas dalam Pencatatan dan pelaporan dana BOS.

#### a. Akuntabilitas dalam Pencatatan Dana BOS

Akuntabilitas dalam pencatatan Dana BOS itu dapat dilihat dengan adanya Dokumentasi dan informasi dalam pengelolaan anggaran di sekolah sudah diterapkan oleh SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan penuturan kepala sekolah SMA Muhammadiyah Rappang, bahwa:

“disini tersedia dokumen-dokumen yang berkaitan tentang pengelolaan Dana BOS seperti dokumen RKAS dan Laporan Pertanggungjawaban anggaran kegiatan yang disertai dengan bukti fisik. Pencatatan

penggunaan Dana BOS ini sudah sesuai dengan JUKNIS 2017 yang berlaku.

b. Akuntabilitas dalam Pelaporan Dana BOS

Kegiatan pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah di buat oleh Tim Manajemen BOS dan secara khusus oleh Bendahara BOS. Menurut Buku Petunjuk Teknis BOS, laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan. Hal ini sesuai dengan penuturan kepala sekolah SMA Muhammadiyah Rappang bahwa:

“sekolah harus membuat laporan sesuai format dalam buku pedoman. Waktu pelaporan dana BOS tiap satu triwulan. Laporan tersebut diberikan kepada pemerintah, sekolah, yayasan dan juga orang tua siswa yang membutuhkan”.

Kemudian menurut kepala sekolah SMA Muhammadiyah Pangsid bahwa:

“pelaporan dana BOS tiap satu semester. Laporan hasil evaluasi penggunaan dana BOS disusun oleh Tim Manajemen BOS dan terkhusus disusun oleh Bendahara BOS Laporan diberikan kepada dinas pendidikan provinsi,”.

Sekolah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas harus mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta berorientasi terhadap pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. SMA Muhammadiyah Rappang dalam menentukan sasaran yang ditetapkan yang dijelaskan oleh kepala sekolah bahwa:

“pihak sekolah melakukan analisis pendidikan saat ini dan satu tahun kedepan. Hal tersebut dilakukan sekolah untuk menentukan skala prioritas program/kegiatan sehingga perencanaan sesuai dengan hasil

pelaksanaan dan sebagai bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

Dalam teori sebelumnya dipaparkan bahwa tujuan akuntabilitas adalah dapat menentukan tujuan yang tepat. Hal yang dimaksud dengan tujuan yang tepat disini adalah pemanfaatan pengelolaan dana seefektif mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan atas tujuan dari program tersebut . SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menentukan anggaran disesuaikan dengan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala sekolah SMA Muhammadiyah Rappang bahwa:

“penggunaan anggaran sudah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) yang telah dibuat sebelumnya.

Sasaran kebijakan dalam pengelolaan keuangan di sekolah sangat penting, yaitu untuk menetapkan tujuan dan hal yang paling penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan oleh bendahara SMA Muhammadiyah Pangsidi, bahwa:

“Setelah penetapan sasaran kebijakan tercapai, maka sekolah harus menilai kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tolak ukur dalam menilai sasaran kebijakan anggaran yaitu dengan melihat anggaran yang direncanakan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

Prinsip akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh para pemangku kepentingan segala kebijakan dan memberikan informasi dalam kebijakan pengelolaan keuangan sekolah, seperti yang dipaparkan oleh bendahar SMA Muhammadiyah Rappang bahwa :

“dalam melakukan penyebaran informasi tersebut melalui rapat internal, baik yang dilakukan dengan Dinas, guru, dan karyawan serta komite sekolah dan juga melalui papan informasi di sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah cukup baik karena sudah memenuhi indikator tercapainya Akuntabilitas, yaitu dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai informasi kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan tujuan sekolah serta penilaian dan evaluasi dari setiap anggaran kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, dan juga kegiatan pelaporan untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana sudah sesuai dengan aturan.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti setelah kegiatan penelitian dan analisa yaiStu Penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan penggunaan Dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang telah menggunakan petunjuk teknis (JUKNIS). SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan penyusunan anggaran Dana BOS dengan pendekatan PPBS (*Planning Programming Budgeting System*).

PPBS merupakan perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan program/kegiatan dari masing-masing unit di sekolah. SMA Muhammadiyah menggunakan PPBS, yaitu dengan adanya rapat kerja yang dilakukan sekolah setiap awal tahun ajaran untuk membahas program/kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Keterbukaan dalam perencanaan keuangan dilakukan di SMA Muhammadiyah, yaitu dengan membuat RKAS (Rencana Kegiatan anggaran sekolah) pada tahun ajaran baru. Proses pembuatan RKAS menggunakan sistem bootom up, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan karyawan serta komite) dan disetujui oleh atasan yaitu kepala sekolah. Dalam perencanaan anggaran sekolah pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, staff, dan komite yang membuat rencana anggaran sesuai dengan JUKNIS.

Penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang diterapkan dengan adanya ketelibatan guru, staff, dan komite sekolah dalam membuat anggaran kegiatan dan laporan pertanggungjawaban serta laporan kegiatan dan anggaran yang ada sudah di publikasikan melalui laporan pertanggungjawaban dana BOS yang tersedia diruang guru dan papan informasi sekolah. Dan juga adanya tim audit atau pengawas yang independen dari dines pendidikan kabupaten dan provinsi. Prinsip transparansi ini terpenuhi sesuai dengan indikator yang dibuktikan dengan adanya hasil wawancara dengan informan.

Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dengan membuat laporan pengelolaan Dana BOS untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan yaitu yayasan, orang tua, dan pemerintah. Sedangkan monitoring terhadap hasil evaluasi penggunaan dana BOS disampaikan setiap triwulan untuk dana BOS Provinsi dilaporkan per semester. Jadi penerapan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sesuai dengan indikator pencapaian akuntabilitas dibuktikan dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai informasi kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan tujuan sekolah serta penilaian dan evaluasi dari setiap anggaran kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh safratunnisa (2015) dengan judul "Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah di SD Islam Binakheir" bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran Dana BOS dalam program RKAS, sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat, yang dalam hal ini kaitannya dengan komite sekolah dan wali murid. Partisipasi masyarakat berupa

dukungan yang diberikan oleh komite sekolah dan wali murid, dan pemerintah dalam pelaksanaan program sekolah yang telah direncanakan dan tercantum dalam program RKAS. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian saya yang dilakukan di SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa sekolah memberikan kesempatan kepada guru, karyawan, dan komite sekolah untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan/program sekolah.

Pertisipasi guru dan staff SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu dengan membuat daftar usulan kebutuhan yang akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan RKAS untuk satu tahun ajaran. SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan sekolah swasta yang telah melakukan pembukuan keuangan dengan baik. Sumber penerimaan dana SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang berasal dari Dana Gratis dan Dana BOS yang dibuat laporan keuangannya secara terperinci. SMA Muhammadiyah di kabupaten Sidenreng Rappang membuat laporan bulanan, tahunan, dan laporan pertanggungjawaban dana BOS kepada yayasan dan pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sekolah kepada stakeholders. Penelitian ini sejalan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tomi Victoria tahun 2014 dengan judul "Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan, bahwa sekolah

dikatakan transparan jika pelaporan dilakukan secara intern dan ekstern mulai dari laporan triwulan, semester, dan tahunan.

Berdasarkan hasil penelitian dari kedua peneliti diatas khususnya penelitian Tomi Victoria yang dilakukan di SMK Muhammadiyah Prambanan itu sejalan dengan hasil penelitian yang saya lakukan di SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan indikator pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas, yaitu adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS pada masing-masing sekolah tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis dapat memberikan saran, sebaiknya semua stakeholder yang terkait dengan program kerja yang menggunakan anggaran Dana BOS supaya lebih aktif dan berpartisipasi dalam pengusulan pembuatan RKAS, dan penggunaan anggaran Dana BOS itu harus sesuai antara perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran untuk menghindari tindakan pidana dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico. 2007. *Good e-Government Transparansi dan akuntabilitas Publik Melalui e- Government*. Bayumedia Publishing: Malang
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Pendidikan*: Erlangga: Jakarta
- Fauzan. 2014 Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *Journal*, Vol 10 No 3.
- <http://bos.kemdikbud.go.id/home/about> Diakses Tanggal 28 November 2017
- Jubaeda, Edah, Nugraha Lili dan Hariz Fauzan. 2008. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. PKP2AI LAN: Bandung.
- Julantika T, Djoko S, Taufik K. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, (Online), Vol IV, (<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/>, diakses 27 November 2017).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*: Erlangga: Jakarta
- Minarti, Sri. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*: Ar-Ruzz: Jogjakarta.
- Novie, K,M. 2017. Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardatillah Singaraja, *e-Journal*, Vol 7, No 1.
- Peraturan Perundang-undangan*
- Pembukaan UUD 1945 Alenia Ke IV*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan Dana BOS
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26/2017. 2017. *Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Depertamen Pendidikan dan Kebudayaan.

*Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pasal 59 mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan*

*Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009. Tentang pengelolaan Dana BOS*

Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*: Alfabeta: Bandung

Shafratunnisa, Fierda. 2015. Persepsi Stakeholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir, (Online), (<http://103.229.202.68/dspace/bitstream/>), diakses 27 November 2017).

Solikhatun, Ismi. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK 1 Yogyakarta, *Jurnal, Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia Edisi 5*. (Online), (<http://student.uny.ac.id/ojs/>), diakses 27 November 2017).

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*: Alfabeta: Bandung

Sulfiati, S.A. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Online), Vol 3, No 2. (<http://journal.unhas.ac.id/index.php/>), diakses 27 November 2017).

Sutedi, Adrian. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*: Sinar Grafika: Jakarta

Sutedjo. 2009. "Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah". Tesis. Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Victoria, Tomi. 2014. Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan. (Online), (<http://eprints.uny.ac.id/>), diakses 27 November 2017).

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*: Mandar Maju: Bandung.

**TABEL HASIL WAWANCARA**

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Rappang	Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Pangsid	Bendahara Dana BOS	Guru
1	Apakah sekolah mempunyai JUKNIS (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di sekolah	Iya saya kira itu untuk klau itu kita pakai RAB disitula muncul semua dana dan semua sudah mempunyai aturan/pedoman bahwa dana itu di peruntukkan sesuai juknis dana bos	Iya betul sekali karna kita ketahui bersama bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah itu mempunyai prosedur atau peraturan-peraturan yang harus kita pedomani dalam penggunaannya sehingga kita tidak melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana tersebut sehingga apa yang di	Iya, karna kita menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) itu kita membuat dengan mempedomani JUKNIS yang berlaku	Iya, karna dalam penyusunan suatu anggaran itu harus ada petunjuknya atau pedomannya sehingga dana yang dikeluarkan itu jelas penggunaannya

			harapkan oleh pihak pemerintah itu dapat tercapai sesuai dengan tujuannya		
2	Apakah sekolah memiliki keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran sekolah kepada <i>stakeholders</i> internal (Kepala Sekolah, guru, dan staff)?	Iya, kita terbuka terhadap stakeholder yang berkepentingan, yaitu melibatkan tim manajemen dan komite dalam merencanakan biaya pendidikan peserta didik dalam satu tahun ajaran, guru dan karyawan mengajukan kebutuhan selama satu tahun dan membuat daftar usulan anggaran kegiatan	“iya, kita dalam melakukan perencanaan anggaran itu terlebih dahulu kita melakukan rapat untuk membuat rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) yang melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, komite, dan guru, sehingga Dana BOS yang ada bisa diperuntukan pada semua kebutuhan yang kita butuhkan pada saat proses belajar mengajar dalam satu tahun”.	Iyaa,,dalam membuat Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) itu kita membuat dengan mempedomani atau berdasarkan pada petunjuk teknis (JUKNIS) pengelolaan Dana BOS tahun 2017”.	“jelas, Dalam proses penyusunan RKAS guru, komite dan staff dilibatkan untuk mengumpulkan masing-masing kegiatan yang yang dibutuhkan dan Tim Manajemen BOS akan mempertimbangkan”

3	Apakah sekolah memiliki keterbukaan dalam proses pencatatan anggaran sekolah kepada <i>stakeholders</i> internal ( Kepala Sekolah, guru, dan staff)	"iye, kami terbuka dalam proses pencatatannya semuanya bisa dilihat langsung di LPJ dan pada saat mencatat juga harus disertai dengan bukti-bukti.	"iya, Jadi dalam pengelolaan anggaran dana bos itu memang kita diwajibkan untuk melakukan pencatatan secara terbuka makanya setiap pertemuan kita memperlihatkan buku kas sekolah dimana setiap dana yang terpakai, dana yang masuk dan dana itu diperuntukan untuk apa dapat diketahui oleh semua guru, komite dan semua pihak-pihak sekolah yang aktif"	"dalam melakukan pencatatan anggaran Dana BOS kita harus menyertakan kwitansi sebagai bukti pengeluaran dana yang akan dicocokkan pada saat pencatatan".	"Pencatatan Dana BOS itu dicatat di buku kas sekolah, dimana setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran itu dicatat di buku kas sekolah sehingga dapat diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan kepada setiap stakeholder yang ingin melihat jumlah saldo dan pengeluaran yang terjadi".
4	Apakah sekolah memiliki keterbukaan dalam proses penggunaan anggaran sekolah kepada <i>stakeholders</i> internal ( Kepala Sekolah, guru, dan staff)	iya,Kami menggunakan anggaran dana BOS itu untuk kegiatan yang telah direncanakan	Jelas, Jadi semua penggunaan anggaran Dana BOS itu kita publikasikan melalui dokumen laporan	"iya, jadi dalam penggunaan Dana BOS itu guru, karyawan, dan orang tua siswa saling bekerja sama dalam	"iya, karna semua dana BOS yang kita gunakan itu sesuai dengan RKAS yang telah dibuat sebelumnya, apalagi

		sebelumnya dalam RKAS untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan program kegiatan sekolah, dan membuat laporan pertanggungjawaban disertai dengan kwitansi atau bukti fisik.”	pertanggung jawaban yang selalu tersedia di ruang guru serta mempublikasikannya melalui papan informasi sekolah sehingga dengan mudah stakeholder atau orang yang berkepentingan dengan mudah melihat penggunaan anggaran Dana BOS tersebut	melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat terealisasi sesuai dengan RKAS yang telah direncanakan sebelumnya	ada yang namanya bukti seperti kwitansi itukan sudah mendukung bahwa penggunaan dana BOS itu digunakan untuk kegiatan yg sudah direncanakan sebelumnya.
5	Apakah pihak sekolah memiliki lembaga audit/auditor yang khusus untuk mengawasi dana BOS tersebut	“iya, Komponen utama yang dimonitor oleh pengawas sekolah yaitu alokasi dana, penyaluran dana, penggunaan dana, pelaporan dan lain-lain yang terkait dengan pengelolaan dana BOS”.	“iyaa,,Ini memang ada timnya di Dinas Pendidikan, biasanya itu untuk pengawasan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi itu ada tim dari Dinas Pendidikan dan untuk evaluasi penggunaan dana	“Iya, yaitu pengawas dari Dinas pendidikan kabupaten, provinsi dan pengawas sekolah	“iyaa,,Pengawasan dilakukan oleh sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi. Pemantauan yang dilakukan dalam hal Pelaksanaan penggunaan Dana BOS, Pemantauan terkait pengecekan kesesuaian dana dengan bukti-bukti

			BOS selalu di laksanakan di Dinas pendidikan Provinsi jadi setiap satu triwulan selalu di pertanggungjawabkan di Dinas pendidikan Provinsi”		yang ada
6	Apakah sekolah mempublikasikan setiap hasil laporan anggaran sekolah kepada <i>stakeholders</i> internal dan eksternal?	Iya biasanya Melalui laporan-laporan dan rapat-rapat yang di sampaikan dan di perlihatkan hasilnya seperti pembangunan fisik yang Nampak	Nahh itu tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap LPG atau pelaporan anggaran yang sudah di gunakan itu kita selalu melakukan semacam pertemuan untuk membahas jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang keluar kemudian tentunya kita sudah berpedoman dengan LPG	Iya, semua kita buat laporan pertanggungjawaban Dana BOS	“Iya biasanya di publikasikan di papan informasi sekolah agar lebih mudah dilihat oleh org yang membutuhkannya.
7	Apakah pihak sekolah	“iyaa,disini tersedia	Yaah di sini dalam	Iya, disini tersedia	Iyaa, setiap triwulan

	mendokumentasikan setiap keputusan/kebijakan dalam proses penganggaran sekolah?	dokumen-dokumen yang berkaitan tentang pengelolaan Dana BOS seperti dokumen RKAS dan Laporan Pertanggungjawaban anggaran kegiatan yang disertai dengan bukti fisik. Pencatatan penggunaan Dana BOS ini sudah sesuai dengan JUKNIS 2017 yang berlaku	melaksanakan atau mengambil keputusan untuk kebijakan dalam penggunaan dana bos itu selalu ada dokumentasi karena kita melakukan semacam pertemuan atau rapat dalam untuk mengambil keputusan bersama atau kebijakan dalam penggunaan dana BOS jadi itu biasa di buat dalam suatu catatan-catatan rapat	tersedia dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS	kita membuat yang namanya laporan pertanggungjawaban LPJ
8	Bagaimana bentuk pelaporan Dana BOS itu dilakukan ?	"sekolah harus membuat laporan sesuai format dalam buku pedoman. Waktu pelaporan dana BOS tiap satu triwulan. Laporan	pelaporan dana BOS tiap satu semester. Laporan hasil evaluasi penggunaan dana BOS disusun oleh Tim Manajemen		

		tersebut diberikan kepada pemerintah, sekolah, yayasan dan juga orang tua siswa yang membutuhkan”.	BOS dan terkhusus disusun oleh Bendahara BOS Laporan diberikan kepada dinas pendidikan provinsi,”.		
9	Bagaimana pihak sekolah menentukan skala prioritas program/kegiatan serta sasaran dan tujuannya dalam penggunaan anggaran sekolah?	“pihak sekolah melakukan analisis pendidikan saat ini dan satu tahun kedepan. Hal tersebut dilakukan sekolah untuk menentukan skala prioritas program/kegiatan sehingga perencanaan sesuai dengan hasil pelaksanaan dan sebagai bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan	Dalam menentukan skala prioritas itu di lihat dari segi pentingnya jadi di lihat dari segi kebutuhan sekolah memang sangat banyak sedangkan dana yang ada hanya seberapa sehingga kita harus menggunakan dana BOS secara efektif sehingga apa yang lebih di butuhkan itu yang lebih di utamakan karena kita tau sendiri bahwa dana BOS	penetapan sasaran kebijakan tercapai, maka sekolah harus menilai kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tolak ukur dalam menilai sasaran kebijakan anggaran yaitu dengan melihat anggaran yang direncanakan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.	

			itu untuk siswa itu cuman Rp.400.000 per individu per satu triwulan,		
10	Apa saja media yang digunakan pihak sekolah dalam menyebarluaskan informasi laporan keuangan sekolah kepada <i>stakeholders</i> internal dan eksternal ?	“dalam melakukan penyebaran informasi tersebut melalui rapat internal, baik yang dilakukan dengan Dinas, guru, dan karyawan serta komite sekolah dan juga melalui papan informasi di sekolah.	Media yang biasa digunakan yaitu papan pengumuman, di sekolah ada ada papan pengumuman untuk penggunaan dana BOS kemudian untuk di luar pihak sekolah itu berupa dokumen atau semacam LPJ	Biasa menggunakan media online jika dibuhkan tapi itu sangat jarang dilakukan.	Media nya seperti dalam bentuk laporan pertanggung jawaban dan papan informasi disekolah

## DATA INFORMAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>PEKER JAAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>LAMA BEKERJA</b>
1	Drs. A. Malik. MA	Laki-Laki	Pns	Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Rappang	15 Tahun
2	Rasnah, S.Pd.,M.Pd	Perempuan	Pns	Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Pangsid	12 Tahun
3	Masrah, S.Pd	Perempuan	Honoror	Bendahara	10 Tahun
4	Sainab, S.Pd	Perempuan	Honoror	Bendahara	5 Tahun
5	Syahrani, S.Pd	Laki-Laki	Honoror	Guru	5 Tahun

L

A

M

P

I

R

A

N

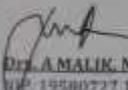
Nama Sekolah SMA Muhammadiyah Rappang  
 Desa / Kelurahan Rappang  
 Kabupaten Sidenreng Rappang  
 Provinsi Sulawesi Selatan

Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
				Rp21.560.000		
12/06/2017			Pemarikan dari BRI		Rp 5.075.860	
13/06/2017		001	Bayar ATK pembelajaran		Rp 1.100.000	
13/06/2017		002	Bayar transport kegiatan pengayaan		Rp 500.000	
14/06/2017		003	Bayar ATK ulangan tengah semester genap 2016/2017		Rp 50.000	
14/06/2017		004	Bayar pengandaan masalah soal UTS Genap 2016/2017		Rp 500.000	
15/06/2017		005	Bayar konsumsi UTS Genap 2016/2017		Rp 200.000	
15/06/2017		006	Bayar biaya simulasi persiapan UNBK		Rp 2.350.000	
16/06/2017		007	Bayar taban pembenahan lapangan olahraga		Rp 1.150.000	
16/06/2017		008	Bayar ongkos kerja pembenahan lapangan olahraga			
17/06/2017		009	Bayar Biaya transport workshop pengembangan model sumber belajar berbasis TIK Tahap I		Rp 200.000	
17/06/2017		010	Bayar Biaya konsumsi workshop pengembangan model sumber belajar berbasis TIK Tahap I		Rp 200.000	
17/06/2017		011	Bayar Biaya transport workshop pengembangan model sumber belajar berbasis TIK Tahap II		Rp 200.000	
17/06/2017		012	Bayar Biaya konsumsi workshop pengembangan model sumber belajar berbasis TIK Tahap II		Rp 200.000	
19/06/2017		013	Bayar biaya pembelian cat pagar sekolah		Rp 1.700.000	
20/06/2017		014	Bayar biaya ongkos kerja pengecatan pagar sekolah		Rp 800.000	
21/06/2017		015	Bayar biaya penginstalan komputer		Rp 200.000	
21/06/2017		015	Bayar biaya penginstalan komputer		Rp 180.000	
22/06/2017		016	Bayar iuran majalah Gema Suara Guru		Rp 240.000	
22/06/2017		017	Bayar iuran surat kabar Ajalappareng		Rp 750.000	
23/06/2017		018	Bayar pembelian kartu kuota internet		Rp 208.140	
23/06/2017		019	Bayar listrik bulan januari, february, maret			

I am Sorry !!!!!

24/06/2017		020	Bayar iuran PDAM januari, february, maret		Rp 133.000	
26/06/2017		021	Bayar biaya transport penginputan data individual sekolah		Rp 750.000	
26/06/2017		022	Bayar Spanduk		Rp 700.000	
26/06/2017		023	Bayar tempat sampah rangka besi		Rp 950.000	
26/06/2017		024	Bayar Konsumsi rapat pembagian tugas guru		Rp 220.000	
27/06/2017		025	Bayar Catridge Canon F10		Rp 750.000	
27/06/2017		026	Bayar ATK Ruang Osis Sekolah		Rp 943.000	
27/06/2017		027	Bayar Catridge Canon R11		Rp 885.000	
28/06/2017		028	Bayar ATK pelaporan dana BOS Triwulan I		Rp 76.000	
28/06/2017		029	Bayar Konsumsi pembuatan laporan dana BOS Triwulan I		Rp 50.000	
28/06/2017		030	Bayar fotocopy pelaporan dana BOS Triwulan I		Rp 174.000	
29/06/2017		031	Bayar Lampu Philips		Rp 125.000	
			<b>Jumlah</b>	Rp21.560.000	Rp 21.560.000	

Mengetahui  
Kepala Sekolah

  
**D. A. MALIK, MA**  
 NIP. 19580727 199101 1 001

Bendahara

  
**SAINAB.S.Pd**

I am Sorry !!!!!

CONTOH LAPORAN BUKU KAS SEKOLAH



Gambar 1. Dokumentasi wawancara Bendahara SMA Muhammadiyah Rappang



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Pangsid



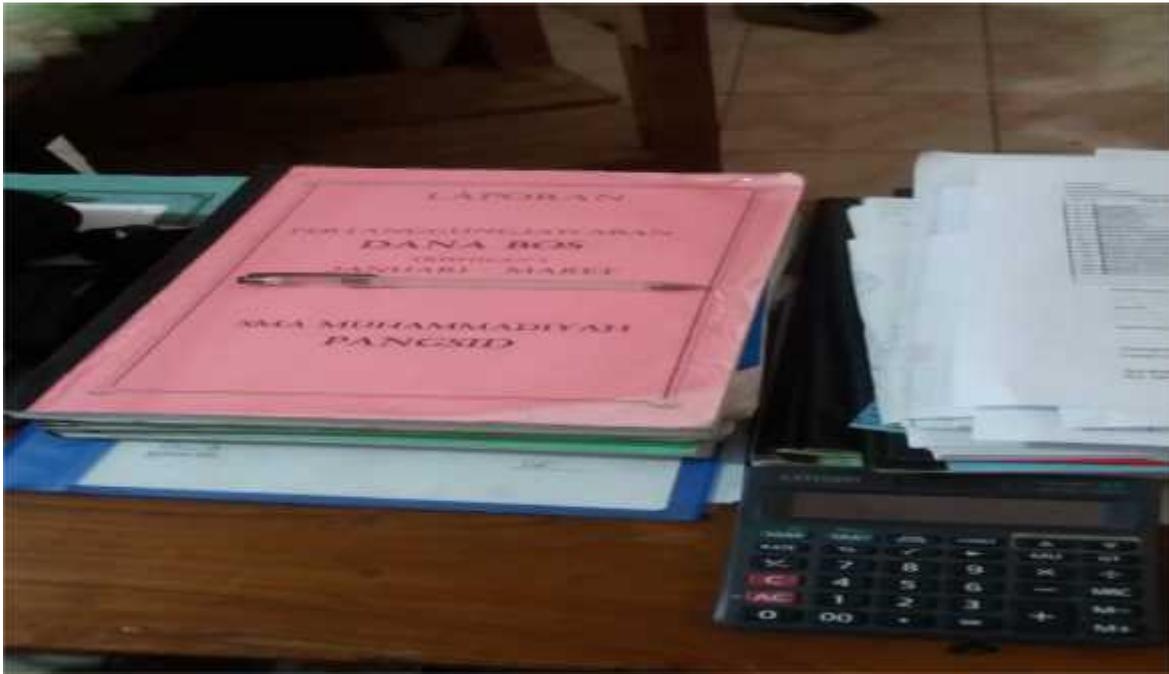
Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Bendahara SMA Muhammadiyah Pangsid



Gambar 4. Dokumentasi Wawancara Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Rappang



Gambar 5. Dokumentasi Wawancara Guru



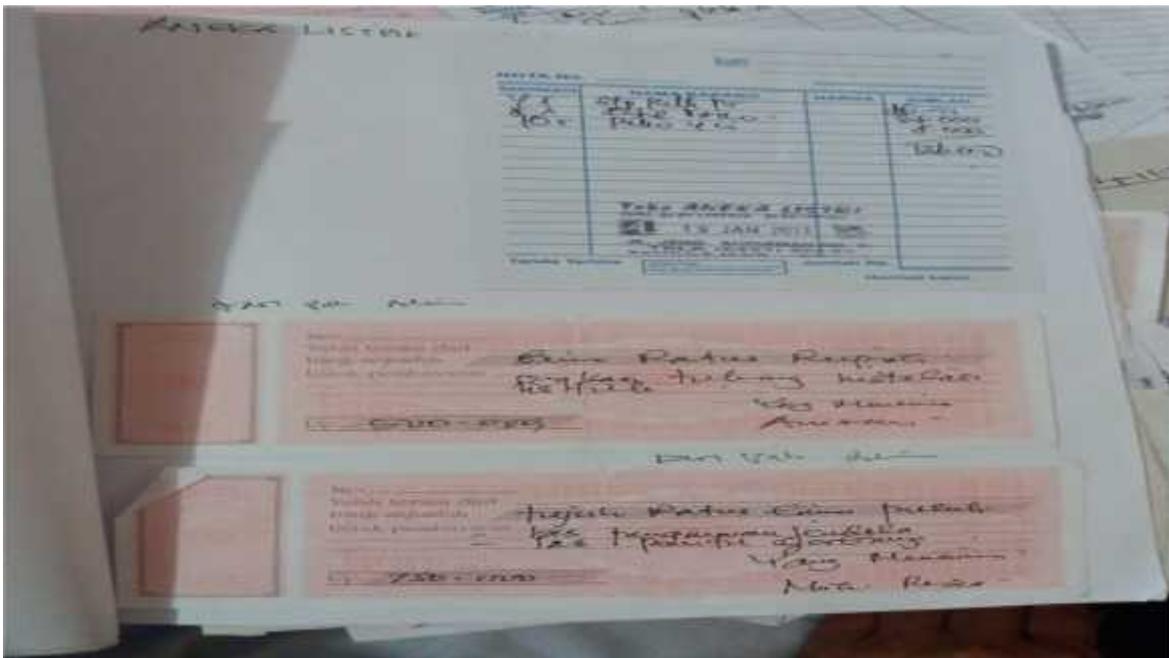
Gambar Berkas Laporan Pertanggungjawaban di Ruang Guru



Gambar Papan Informasi Sekolah



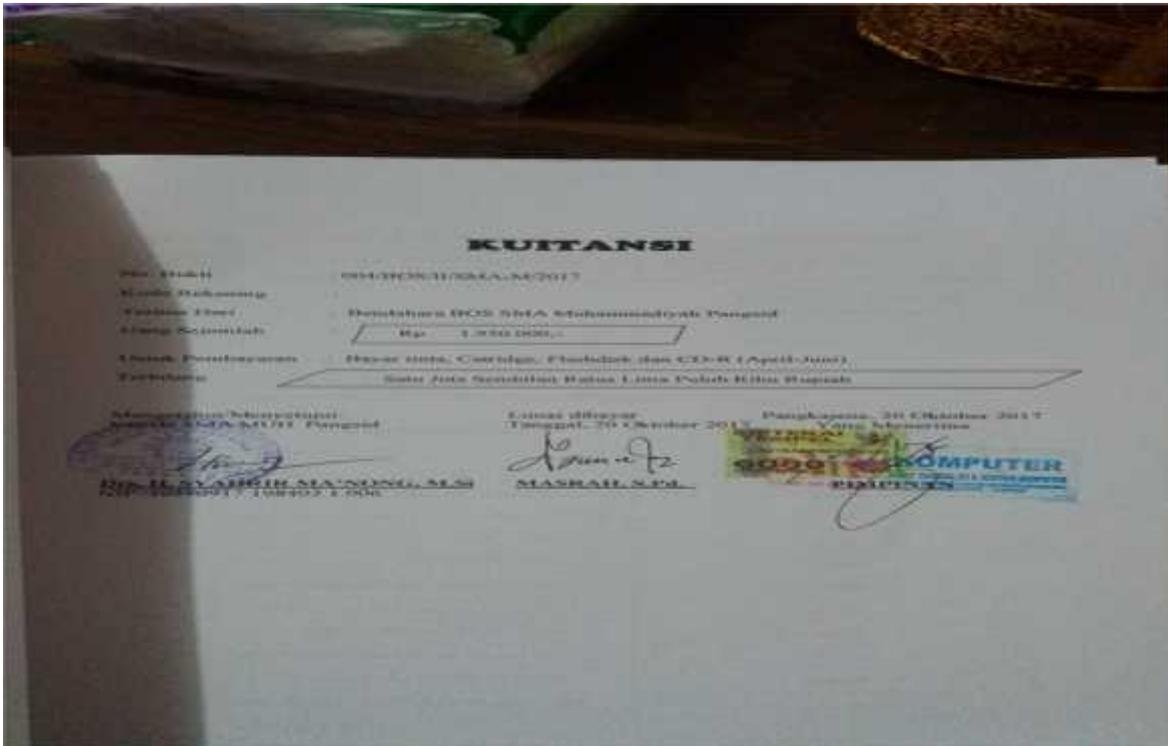
Gambar Papan Informasi saat Rapat



Gambar Nota Pembayaran



Gambar Faktur Penjualan



Gambar Kwitansi

## RIWAYAT HIDUP



**JUMIANTI**, lahir di Compong, 20 Juni 1996 merupakan anak tunggal. Anak yang memiliki hobi olahraga bola volly ini adalah buah cinta kasih dari pasangan Andung dan Ahida. Penulis menempuh pendidikan pada tahun 2002 di SD Negeri 3 Batu

dan tamat pada tahun 2008, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 3 Pitu Riase dan tamat pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan ke jenjang menengah atas pada tahun 2011 tersebut di SMK Negeri 1 Sidenreng Rappang dan tamat pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 tepatnya pada bulan September, penulis diterima di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan tahun 2018 ini merupakan tahun terakhir pendidikannya di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.